



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10080-10089

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kolaborasi *Governance* Dalam Program Kampung Iklim Di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat

Sophi Alifiyah¹✉, Herlina Muzanah Zain²

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Ilmu Sosial

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: alifiyahsophi@gmail.com ¹✉

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kolaborasi *governance* dalam implementasi program kampung iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai desain penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen terkait program kampung iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi *governance* telah berkontribusi pada keberhasilan program ini dengan partisipasi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Meskipun terdapat tantangan seperti kompleksitas koordinasi antarlembaga, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan pendanaan yang memadai untuk mendukung program kampung iklim di wilayah tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang pentingnya kolaborasi *governance* dalam implementasi program kampung iklim di tingkat lokal.

Kata kunci: Kolaborasi, Governance, Kampung Iklim, Perubahan Iklim, Partisipasi Masyarakat, Jakarta Pusta

Abstract

This research analyzes the governance collaboration in the implementation of the climate village program in RW 03, Cempaka Putih Timur Subdistrict, Central Jakarta. The research method used was a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observation, and analysis of documents related to the climate village program. The research findings indicate that governance collaboration has contributed to the success of this program through the participation of the community, government, and private sector. Despite challenges such as the complexity of interagency coordination, recommendations are provided to enhance collaboration, community

participation, and adequate funding to support the climate village program in the area. This research contributes to understanding the importance of governance collaboration in implementing climate village programs at the local level.

Keywords: *Governance Collaboration, Climate Village, Climate Change, Community Participation, Central Jakarta*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim global telah menjadi isu yang sangat penting dan mendesak bagi Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menginisiasi Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim. ProKlim adalah program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setidaknya pada tingkat Rukun Warga (RW) atau kampung. ProKlim terdiri dari berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dapat dilakukan di tingkat lokal. Program ini dirancang untuk menghadapi dan mencegah dampak perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat guna menghadapi perubahan iklim. Program ini tidak hanya mengandalkan pemerintah sebagai penyelenggara, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan sektor swasta dalam rangka mengurangi risiko dan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Penelitian ini difokuskan pada analisis kolaborasi *governance* dalam implementasi Program Kampung Iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Kolaborasi *governance* adalah aspek penting dalam keberhasilan program ini, karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim. Kolaborasi ini mencakup pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang bekerja bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Menurut Ansell & Gash (2007), *collaborative governance* merupakan salah satu bentuk tata kelola yang menekankan pentingnya kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang memungkinkan sektor publik dan sektor swasta bekerja sama untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dan menguntungkan bagi masyarakat. Dalam konteks Program Kampung Iklim, kolaborasi *governance* berperan dalam mengubah regulasi dan sistem yang ada untuk menghadapi perubahan iklim dan mengurangi dampaknya.

Goliday (2010) juga menjelaskan bahwa *collaborative governance* melibatkan manajemen hubungan untuk mengubah regulasi dan sistem yang ada. Jaringan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk melaksanakan program-program dalam rangka mengurangi risiko perubahan iklim. Dalam hal ini, kolaborasi *governance* berfungsi sebagai kemitraan khusus antara sektor publik dan sektor swasta, di mana pihak-pihak swasta berperan dalam mempengaruhi sektor publik.

Kelurahan Cempaka Putih Timur merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan Program Kampung Iklim dengan baik. Kompleks Kelurahan ini didesain dengan rapi dan menyediakan

ruang publik untuk berbagai kegiatan masyarakat, termasuk program iklim. Salah satu program iklim yang menjadi unggulan di Kelurahan Cempaka Putih Timur adalah Gang Hijau. Program ini melibatkan penghijauan di sebagian besar gang-gang di setiap RT dengan menanam berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman buah anggur yang telah berhasil dipanen beberapa kali.

Selain itu, Kelurahan Cempaka Putih Timur juga memiliki aset berupa lahan di sepanjang sungai yang dimanfaatkan dengan baik. Lahan yang panjang tersebut digunakan untuk menempatkan rak-rak hidroponik dan juga sebagai tempat berkumpul bagi warga. Kegiatan hidroponik di Cempaka Putih Timur telah berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang menghasilkan sayuran berkualitas tinggi. Meskipun masih dalam skala rumah tangga, sayuran hasil hidroponik ini memiliki keunggulan dalam kandungan gizi dan kebersihan karena dijamin organik.

Meskipun Program Kampung Iklim melibatkan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kelurahan Cempaka Putih Timur menjadi contoh yang baik dalam mengoptimalkan kolaborasi *governance* dalam implementasi program ini. Kelurahan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama kelompok tani dan ketua RT di setiap RT, termasuk di wilayah RW 03. Selain itu juga terlibatnya pihak swasta yaitu PT Pertamina Patra Niaga yang sejak tahun 2020 hingga sekarang terus mendukung implementasi kebijakan Proklam di kelurahan Cempaka Putih Timur ini. Dengan melibatkan semua pihak terkait, Kelurahan Cempaka Putih Timur dapat menciptakan lingkungan yang hijau dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami peran dan kontribusi kolaborasi *governance* dalam implementasi Program Kampung Iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi *governance* menjadi landasan penting dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin kompleks. Dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan dapat tercipta upaya bersama dalam mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kelurahan Cempaka Putih Timur.

Kolaborasi *governance* dalam implementasi Program Kampung Iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur mencakup berbagai tahapan kebijakan publik. Setiap tahun, ada penilaian nasional terhadap pelaksanaan Proklam berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penilaian ini mencakup tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengembangan dan penguatan aksi (Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim No. P1.PPI/SET/KUM.I/2/2017, 2017). Tahapan-tahapan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat.

Dalam tahap perencanaan, kolaborasi *governance* memungkinkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bekerja bersama dalam mengidentifikasi tantangan dan potensi yang ada di Kelurahan Cempaka Putih Timur terkait perubahan iklim. Dengan mengumpulkan berbagai informasi dan pengetahuan, pihak-pihak terkait dapat membuat rencana yang komprehensif dan efektif untuk menghadapi perubahan iklim. Setelah perencanaan, tahap pengorganisasian kegiatan menjadi kunci

dalam implementasi Program Kampung Iklim. Kolaborasi *governance* memungkinkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bekerja sama dalam menentukan langkah-langkah konkret yang harus diambil. Misalnya, dalam hal penghijauan Gang Hijau, pemerintah dapat menyediakan bibit tanaman, masyarakat dapat berperan dalam menanam dan merawat tanaman, sementara PT Pertamina Patra Niaga memberikan dukungan finansial serta bantuan teknis.

Selain itu, kolaborasi *governance* juga berperan dalam memfasilitasi akses terhadap sumber daya yang diperlukan dalam implementasi program. Misalnya, dalam hal pengembangan hidroponik, pemerintah dapat memberikan bantuan dalam bentuk pengetahuan dan teknologi, masyarakat dapat menyumbangkan lahan yang tersedia, sementara PT Pertamina Patra Niaga dapat memberikan bantuan dalam hal permodalan atau distribusi produk.

Selama implementasi program, kolaborasi *governance* juga berperan dalam memastikan kelancaran koordinasi antara berbagai pihak terkait. Komunikasi yang baik dan saling pengertian menjadi kunci dalam menjalankan program dengan efektif. Koordinasi ini melibatkan pertemuan rutin antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan program serta membahas kendala atau perubahan yang terjadi. Selain itu, kolaborasi *governance* juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pembelajaran antar bidang yang terlibat dalam program. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat saling belajar dan bertukar pengalaman dalam menghadapi perubahan iklim. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Selain itu, kolaborasi *governance* juga berperan dalam evaluasi dan pemantauan program. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat bekerja sama dalam mengumpulkan dan menganalisis data terkait dampak dan hasil dari program Kampung Iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Evaluasi ini menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil ke depannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kolaborasi *governance* memainkan peran yang sangat penting dalam implementasi Program Kampung Iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, program ini dapat mengoptimalkan upaya dalam mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang hijau, berkelanjutan, dan lebih baik bagi masyarakat, kolaborasi *governance* menjadi fondasi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.

Menurut Considine & Lewis (2013) *Collaborative governance* adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan dan manajemen yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini mendorong kerja sama, koordinasi, dan konsensus di antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang lebih baik.

Dalam penelitian akan menggunakan teori yang disampaikan oleh Cosidine & Lewis (2013) sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan penerapan Program Kampung Iklim pada Kelurahan

Cempaka Putih Timu, RW 03, Considine & Lewis (2013) mengembangkan kerangka kerja *Collaborative Governance* kedalam beberapa dimensi penting, meliputi :

1. Partisipasi

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dapat memperluas basis pengetahuan, mendapatkan perspektif yang beragam, dan meningkatkan kepercayaan dan dukungan untuk kebijakan yang dihasilkan.

2. Akuntabilitas

Menetapkan tanggung jawab dan mengatur mekanisme yang memastikan bahwa para pemangku kepentingan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas mencakup transparansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kebijakan. Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan melibatkan keterbukaan dan keterbacaan informasi terkait Program Kampung Iklim. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang tujuan program, alokasi anggaran, kegiatan yang dilakukan, dan dampak yang diharapkan. Dengan demikian, transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengikuti dan memahami proses pengambilan keputusan, serta memberikan umpan balik dan masukan yang berharga.

3. Adaptabilitas

Kemampuan program untuk merespons perubahan kondisi iklim menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan program untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul seiring perubahan iklim. Program harus mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca, pola hujan, dan ancaman iklim lainnya untuk tetap efektif dalam mencapai tujuan mitigasi dan adaptasi. Ini dapat melibatkan perubahan dalam praktik pertanian, penggunaan sumber daya alam, atau kebijakan lingkungan yang diterapkan.

Fleksibilitas program dalam menghadapi tantangan yang muncul menunjukkan kemampuan program untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berbeda. Program harus mampu menghadapi tantangan seperti perubahan kebijakan, perubahan kebutuhan masyarakat, atau perubahan dalam kondisi ekonomi. Dengan menjadi fleksibel, program dapat mempertahankan relevansinya dan terus berkontribusi terhadap tujuan perlindungan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kesiapan dalam memodifikasi kebijakan dan praktik kolaboratif sesuai kebutuhan menunjukkan kesiapan program untuk menyesuaikan diri dengan hasil evaluasi dan masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Jika ada kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan program, program harus siap untuk melakukan perubahan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitasnya. Kesiapan untuk memodifikasi kebijakan dan praktik kolaboratif berarti program tersebut dapat belajar dari pengalaman dan meningkatkan kualitas dan dampaknya seiring waktu.

4. Kualitas kebijakan

Mengacu pada keberhasilan kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Kualitas kebijakan mencakup faktor seperti keberlanjutan, yaitu kebijakan yang dapat berkelanjutan dalam jangka panjang; keterlibatan aktor yang beragam, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang representatif; dan kualitas keputusan bersama, yaitu keputusan yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam, analisis yang baik, dan konsensus yang kuat.

Kebijakan yang berkelanjutan harus mampu mempertahankan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim yang telah diimplementasikan dan memastikan bahwa upaya berkelanjutan dilakukan untuk melindungi lingkungan dan meminimalkan dampak perubahan iklim di masa depan.

Kualitas keputusan bersama yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam, analisis yang baik, dan konsensus yang kuat merupakan elemen penting dalam Program Kampung Iklim. Keputusan yang baik harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan perubahan iklim. Analisis yang baik harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, konsensus yang kuat di antara pemangku kepentingan berarti keputusan yang diambil adalah hasil dari proses partisipatif dan kolaboratif, yang memastikan dukungan dan penerimaan yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai desain penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami dan menganalisis kolaborasi *governance* dalam implementasi program kampung iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang konteks, proses, dan interaksi yang terjadi dalam kolaborasi *governance*.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang merupakan penyelidikan mendalam tentang kasus tertentu, dalam hal ini implementasi program kampung iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Melalui studi kasus, peneliti dapat memeriksa kasus spesifik ini dalam konteks yang lebih luas, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi *governance*, dan menganalisis kontribusinya terhadap keberhasilan program.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode, yaitu wawancara, observasi dan analisis dokumen terkait program kampung iklim. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi *governance*, seperti perwakilan pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam program. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh wawasan langsung dari responden dan memahami perspektif mereka tentang kolaborasi *governance* dalam implementasi program kampung iklim. Observasi dilakukan guna mengetahui sejauh mana

program kampung iklim ini di jalankan, sekaligus untuk memantau apakah program ini berjalan sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh pihak-pihak yang terkait.

Selain wawancara, analisis dokumen juga dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang program kampung iklim. Dokumen-dokumen yang dianalisis meliputi rencana program, laporan kegiatan, kebijakan terkait, dan dokumen lain yang terkait dengan implementasi program. Analisis dokumen membantu peneliti dalam memperoleh data tambahan dan melengkapi pemahaman mereka tentang kolaborasi *governance* dalam konteks program kampung iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur.

Dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi dan analisis dokumen, peneliti akan dapat menganalisis secara komprehensif kolaborasi *governance* dalam implementasi program kampung iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dan kontribusi kolaborasi *governance* dalam upaya mencapai tujuan program kampung iklim. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pihak terkait dalam merancang kebijakan dan mengembangkan program serupa di wilayah lain. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pengembangan kebijakan dan tindakan untuk mengatasi perubahan iklim di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menggunakan 15 orang responden yang dimintai keterangan melalui wawancara, 15 orang ini terdiri dari, 1 orang ketua RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, 1 orang ketua kelompok tani, 1 orang sekretaris kelompok tani, 1 orang ketua RT 01, 1 orang ketua RT 02, 1 orang ketua RT 03, 1 orang ketua RT 04, 1 orang kepala bidang humas PT Pertamina Parta Niaga, 1 orang ketua pelaksana program dari PT Pertamina Parta Niaga, serta 6 orang warga yang dipilih secara random.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan dan analisis dokumen terkait maka hasil penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut :

Partisipasi

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Iklim di RW 03 menunjukkan sejauh mana penduduk setempat terlibat dan berkontribusi dalam kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim di lingkungan mereka. Partisipasi dapat mencakup berbagai bentuk, seperti partisipasi aktif dalam pertemuan komunitas, pemberian masukan dalam pengambilan keputusan, kontribusi tenaga kerja, dan implementasi praktik ramah iklim di tingkat rumah tangga.

Peran kelompok tani, ketua RT serta PT Pertamina Parta Niaga dalam kolaborasi *governance* mengacu pada kontribusi mereka dalam upaya kolaboratif untuk mengelola dan mengendalikan program. Di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur terlihat jelas jika kelompok tani membantu dalam implementasi teknik pertanian berkelanjutan, mereka bekerjasama dengan membagikan pengetahuan

mereka kepada masyarakat, dan memobilisasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan terkait pertanian. Sementara itu, ketua RT memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan upaya partisipatif antara warga, menjembatani komunikasi antara pemerintah setempat dan masyarakat, serta memfasilitasi pertemuan dan kegiatan terkait program. Sedangkan pihak-pihak dari PT Pertamina Parta Niaga ikut berperan aktif dengan memberikan bantuan berupa modal usaha serta menyediakan bibit-bibit tanaman hidroponik serta tanaman buah-buahan yang telah mengalami pencangkakan.

Sehingga dapat disimpulkan jika pihak warga, pemerintah dan actor swasta saling terlibat dalam partisipasi guna keberhasilan Program Kampung Iklim pada RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur.



Akuntabilitas

Mekanisme akuntabilitas yang diterapkan dalam Program Kampung Iklim di RW 03 merujuk pada cara di mana pertanggungjawaban ditetapkan dan dilaksanakan dalam pelaksanaan program. Mekanisme ini dapat mencakup pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang teratur terhadap kemajuan, hasil, dan dampak program. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan juga menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menilai kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait.

Dalam Proklim yang diadakan di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur sudah menunjukkan adanya transparansi mengenai kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pihak-pihak pengurus program ini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya rapat mingguan mengenai perkembangan program, selain rapat mingguan masyarakat juga dapat bertanya secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait melalui ketua RT masing-masing, dan yang paling penting masyarakat ikut terlibat aktif dalam penjualan, pemasaran dan pengelolaan tanaman-tanaman hidroponik yang di tanam di perkarangan rumah para warga.

Adaptabilitas

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara saat ini warga dan pihak-pihak yang mengurus program kampung iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur sedang berusaha untuk melakukan beberapa perubahan terkait beberapa jenis tanaman guna memenuhi permintaan yang

masuk. Sesuai dengan tujuan program yaitu untuk meningkatkan taraf hidup bagi warga di RW 03, maka pihak-pihak yang terlibat berfokus pada peningkatan penjualan tanaman hijau guna meningkatkan pendapatan warga secara finansial. Oleh karena itu, dilakukannya perubahan beberapa jenis tanaman untuk memenuhi permintaan akan sayuran hijau.



Kualitas Kebijakan

Keberlanjutan kebijakan yang dihasilkan dari Program Kampung Iklim di RW 03 mengacu pada kemampuan kebijakan untuk bertahan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dampak positif program terhadap lingkungan dan masyarakat pada RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur menunjukkan keberhasilan Program Kampung Iklim. Program penghijauan dengan tanaman hidroponik ini dapat memberikan manfaat nyata, baik dalam hal perlindungan lingkungan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi sumber daya alam, dan peningkatan keanekaragaman hayati, serta dalam memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat, mulai dari peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan mata pencaharian, dan pengurangan kerentanan terhadap perubahan iklim.

SIMPULAN

Penelitian ini melibatkan 15 responden dari berbagai pihak, termasuk ketua RW, ketua kelompok tani, ketua RT, perwakilan PT Pertamina Parta Niaga, dan warga secara acak. Partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Iklim di RW 03 sangat penting, melibatkan partisipasi aktif dalam pertemuan komunitas, kontribusi tenaga kerja, dan implementasi praktik ramah iklim di tingkat rumah tangga. Kelompok tani, ketua RT, dan PT Pertamina Parta Niaga berperan aktif dalam kolaborasi governance, memberikan bantuan dan memobilisasi sumber daya.

Mekanisme akuntabilitas program ini diterapkan dengan baik melalui pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat dapat mengawasi kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Program ini juga adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan penjualan tanaman hijau untuk

meningkatkan taraf hidup warga. Program Kampung Iklim di RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur telah mencapai kualitas kebijakan yang baik. Keberlanjutan kebijakan ini terlihat dari dampak positifnya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

Program penghijauan dengan tanaman hidroponik memberikan manfaat perlindungan lingkungan, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi sumber daya alam, dan peningkatan keanekaragaman hayati. Selain itu, program ini juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi, seperti peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan mata pencaharian, dan pengurangan kerentanan terhadap perubahan iklim. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Ariyaningsih, & Shaw, R. (2023). *Community-Based Approach for Climate Resilience and COVID-19: Case Study of a Climate Village (Kampung Iklim) in Balikpapan, Indonesia. Land*, 12(3), 650.
- Considine, M., & Lewis, J. M. (2013). *Collaborative governance: A new era of public policy in Australia? Australian Journal of Public Administration*, 72(3), 229-239.
- Fitria, S. (2020). Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim (PROKLIM) Di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Tahun 2020. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 1-11.
- Goliday, G. (2010). Collaborative governance and the need for public-private partnerships in environmental management. In S. A. Moore & C. B. Zorn (Eds.), *Global Challenges and Perspectives in Blended and Distance Learning* (pp. 1-14). IGI Global.
- Hudaya, M. R., & Dewi, T. P. (2021). *Collaborative governance* dalam implementasi program kampung iklim di kelurahan talangbubuk, kecamatan plaju, kota Palembang. *KOMUNITAS*, 12(1), 1-10.
- Iriani, T., & Nugraheni, P. L. (2023, January). Pembangunan Kampung Iklim Ramah Lingkungan di Jatinegara Kaum Sebagai Bentuk Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. In *Seminar Nasional Lahan Suboptimal* (Vol. 10, No. 1, pp. 469-479).
- Mahendro, A. Y. M. (2021). Penguatan Jejaring Komunitas Melalui Tindakan Kolaboratif. *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies*, 1(1), 95-115.
- Mutiawati, T., & Sudarmo, S. (2021). *Collaborative governance* dalam penanganan rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 82-98.
- Nurhasanah, D., & Akbar, Y. G. S. (2022). *Stakeholder mapping in the Climate Village Program in DKI Jakarta. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 10(2), 149-158.
- Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim No. P1.PPI/SET/KUM.I/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017.

- Saputra, A. D. S. (2021). *Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) untuk Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals)(Studi Kasus Dusun Banyukerto Desa Kalianget Kabupaten Situbondo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Ulfa, L. M. (2018). *Collaborative Governance Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Urwin, K., & Jordan, A. (2008). *Does public policy support or undermine climate change adaptation? Exploring policy interplay across different scales of governance. Global environmental change, 18(1), 180-191.*
- Wijayanti, N. M. (2020). *Collaborative Governance dalam Program Desa Cerdas Mandiri Lestari dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cilongok Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).